

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

RADITYA ANDIKA KUMARA
NIM. C2C008112

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Raditya Andika Kumara
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG***
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com.,Ph.D.,Akt.

Semarang, 14 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19580816 198603 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Raditya Andika Kumara

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008112

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : ***PENGARUH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT
LAG***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 31 Agustus 2015

Tim Penguji

1. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com., Ph.d., Akt. (.....)

2. Dr. Hj Indira Januari, M.Si., Akt. (.....)

3. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Raditya Andika Kumara, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah - olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2015
Yang Membuat Pernyataan,

(Raditya Andika Kumara)

NIM : C2C008112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Urusi matimu seolah kamu mati besok, urusi hidupmu seolah kamu
hidup selamanya

(Nabi Muhammad SAW)

Kritik paling banter hanya akan melukai ego, tapi sikap antikritik
melukai akal.

Hidup itu sebab akibat

(Raditya Andika)

Try not to become a man of success, but a man of value.

Tuhan tidak bermain dadu

(Albert Einstein)

Manners Maketh Man

(Kingsman)

Saya mempersembahkan skripsi ini untuk :

- ♥ Allah SWT atas karuniaNya saya diberikan kesempatan untuk menjalani pengalaman, pembelajaran dan selalu dikuatkan
- ♥ Untuk Alm. Ayah dan Ibu saya yang selalu menjadi inspirasi dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini
- ♥ Untuk kakak, adik, dan ponakan saya, Galih Wisnu, Muvida Savitri, dan Danu Firza yang senantiasa menjadi motivasi saya
- ♥ Sahabat dan lur-lur saya yang selalu menjadi sandaran dan selalu membantu kapanpun dimanapun

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, pertemuan Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan, jumlah Komisaris Independen terhadap *audit report lag* perusahaan.

Metode yang digunakan untuk mengetahui populasi sampel menggunakan *purposive sampling*. Terdapat 264 perusahaan yang merupakan perusahaan non-keuangan yang dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan rangkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag* namun dengan arah positif, Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Ukuran dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*, Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Kata Kunci :Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, *Audit Report Lag*.

ABSTRACT

This study was conducted to examine the effect of the number of Audit Committee Member, Audit Committee Independence, Audit committee meeting, the size of the Board Independent Commissioner, of the audit report lag companies.

The method used to determine the sample population using purposive sampling. There are 264 companies that are non-financial companies that made the object of research. The population in this study population is the totality of all objects or individuals that have certain characteristics, clear and duplicate to be studied. The population in this study were all non-financial companies went public listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 to 2013.

The results showed that the size of the Audit Committee does not significantly influence the Audit Report Lag, independence of audit committee significant effect on the Audit Report Lag but with a positive direction, Meeting audit committee has no significant effect on the Audit Report Lag, size of the board of a significant and have negative effect on the Audit Report Lag, independent Commissioner significant and have negative effect on the Audit Report Lag.

Keywords : Audit Committee Member, Audit Committee Independence, Meeting of the Audit Committee, Board Size, Commissioner of the Independent, Audit Report Lag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.com., Ph.D., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
4. Pujiharto S.E., M.si., Akt, Ph.D selaku dosen wali penulis yang telah memberi waktu dan saran yang berguna bagi penulis selama perkuliahan.
5. Anis Chariri, S.E., M.com., Ph.D., Akt. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu

perkuliahan penulis selama perkuliahan.

6. RR Karlina Aprilia, S.E., M.si., Akt. selaku dosen favorit yang selalu memberi masukan dan banyak membantu memahami permatakuliahan penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Keluarga besar Wiryosedono dan keluarga besar Soekamti. Dan yang pasti kedua orang tua, (Alm.) Drs. Agus Sulistyono dan Ir. Endang Yuni H M.si., saudara kandung, Galih Wisnu dan Muvida Savitri, dan ponakan saya, Danu Firza. Terima kasih atas doa, inspirasi, semangat dan dukungan yang telah diberikan.
9. Seorang yang selalu mendampingi dalam pembuatan skripsi. Rani Manugrahani. Terimakasih atas hidup, semangat, kesabaran, waktu, dan segalanya.
10. Seseorang yang selalu membantu penulis. Afis Yunika. Terimakasih atas segalanya.
11. Sahabat, sedulur perjuangan “PP”. “Sapma”, dan “Siba”, Cahyo Gembilis, Galih Timbul, Wahyu Mbek, Bryan Kobeh, Mario Sendy, Addis Abeba, Aditya Codot, Bagus Pratama, Bagus Adhi, Rezha Kewek, Sony Cokro, Vega Cyndra, Alex H, Asmarasa Pecel, David Dugong, Hanintyo Krisna, Ben Turnip. Terimakasih keberadaan di hatinya dan untuk sedulur yang selalu ada.
12. Sahabat perjuangan “Corner”. Rizky Akita, Bagas, Bima, Rendy Gendut, Dimas, Amos, Simbolon, Nyonge, Rahma Macun, Bagus, Ocsila, Evan, Yudha, Rovelino, Imam, David, Luanda, Alfian, Iqbal, Ojay, Ucup, Wibi, Nandha,

Preketek. Terimakasih untuk canda dan pelajaran hidup kita.

13. Sahabat perjuangan Semester 14. Ardi Pakweng, Firza Bawang, Indiferent, Lek Jackson, Satriyo Yoyok. Terimakasih untuk kesolidannya dan kekompakannya.
14. Sahabat “N20”. Aldi Bandit, Andris Ruli, Mbah Arko, Chandra Con2, Emiral Mahdy, Ipang, Maharsi, Nucky, Pebi Putra, Pradana Yuda, Satrio Paklek, Yudha Prawira, Tirta Pambudi, Doi Nainggolan, Fakhri. Terimakasih untuk kesolidan dan kerjasamanya di masa perkuliahan.
15. Sahabat “BFF”. Rama Rampex, Dimas Dimpil, Reno Feriano, Dimas Dede, Destamak’e, Aulia Ika. Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya.
16. Untuk keluarga besar Akuntansi 2008 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Terimakasih untuk waktu yang telah kita lewati.
17. Untuk kontrakan Siba Illusion Mario. Jay, Pyta. Terimakasih untuk sarananya.
18. Untuk keluarga besar PP dan PAC PP Semarang Selatan. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
19. Untuk sahabat dan keluarga besar SMA Negeri 1 Semarang. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
20. Untuk keluarga besar CV. Gemah Ripah dan PT. Indonesia Hijau Papan. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
21. Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dari angkatan 2005-

2014. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
22. Untuk keluarga besar Undip. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, bantuan, doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait.

Semarang, 14 Agustus 2015

Penulis

(Raditya Andika Kumara)
NIM. C2C008112

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Agensi	16
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.2.1 Komite Audit	21
2.1.2.1.1 Ukuran Komite Audit	23
2.1.2.1.2 Independensi Komite Audit.....	24
2.1.2.1.3 Rapat Komite Audit.....	25
2.1.3 Ukuran Dewan	26
2.1.4 Komisaris Independen	27
2.1.5 Laporan Keuangan.....	30
2.1.6 Audit dan Standar Auditing.....	31
2.1.7 <i>Audit Report Lag</i>	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36

2.3 Model Penelitian	46
2.4 Pengembangan Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	54
3.1.1 Variabel Dependen	54
3.1.2 Variabel Independen.....	55
3.1.3 Variabel Kontrol	57
3.2 Populasi dan Sampel	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	58
3.4 Metode Pengumpulan Data	59
3.5 Metode Analisis	59
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	59
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	60
3.5.2.1 Uji Normalitas	60
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	61
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	61
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	62
3.5.3 Analisis Regresi.....	62
3.5.3.1 Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)	63
3.5.3.2 Koefisien determinasi (R ²).....	64
3.5.3.3 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	64
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	65
4.1 Populasi dan Sampel	65
4.2 Statistik Deskriptif	66
4.3 Analisis Data	68
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	68
4.3.1.1 Uji Normalitas	68
4.3.1.1 Uji Multikolinearitas.....	72
4.3.1.2 Uji Autokorelasi	73
4.3.1.3 Uji Heterokedastisitas.....	74
4.3.2 Uji Regresi Linear Berganda	76
4.3.3 Overall Test	78
4.3.4 Koefisien Determinasi	78
4.4 Pengujian Hipotesis.....	79
4.5 Pembahasan Hipotesis.....	82
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	91

5.3 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel	65
Tabel 4.2 Diskripsi Statistik.....	66
Tabel 4.3 Uji Normalitas 1	69
Tabel 4.4 Uji Normalitas 2.....	71
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas.....	73
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.7 Nilai Durbin Watson.....	74
Tabel 4.8 Tabel Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.9 Tabel Coefficient Regresi	77
Tabel 4.10 Hasil Uji Model.....	78
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi	79
Tabel 4.12 Uji Hipotesis	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	47
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	70
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas ke-2	72
Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Tabulasi Data	95
Lampiran B Hasil Output SPSS	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia pada umumnya biasa disebut dengan perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang merupakan hasil penggabungan dari berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal, yang tujuan umumnya adalah untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan, dll. Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa. Dalam berjalannya suatu perusahaan. Hasil dari kegiatan produksi perusahaan dirangkum didalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan, mengendalikan perusahaan, dasar pembuatan keputusan, bahan pertimbangan dan pertanggung jawaban terhadap pihak eksternal. Dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat

menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Wardhani (2013) Dalam penyajian Laporan Keuangan terdapat ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif dalam laporan keuangan sering disebut juga dengan Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Kieso et al (2011) Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari :

- a) Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- b) Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya
- c) Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- d) Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
- e) Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.
- f) Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya.

- g) Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Dalam penyajian laporan keuangan sering mendengar sejumlah instansi melakukan kegiatan audit dari auditor-auditor yang ada dengan pengawasan komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Yang nantinya komite audit membantu dewan komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.

Audit adalah salah satu bentuk dari pengawasan, bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan menghindari adanya kebocoran, pemborosan, dan penyimpangan wewenang. Proses dalam audit mencari keterangan, tentang apa dan bagaimana proses berjalannya apa saja yang dilaksanakan oleh suatu instansi yang diperiksa, memberikan hasil dengan apa yang diperiksa, membandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan memberikan kesimpulan hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Seperti masalah yang ada di organisasi Enron di Amerika Serikat yang telah mengejutkan banyak orang. Kecurangan yang telah dilakukan oleh organisasi Enron telah melibatkan kantor akuntan publik (KAP) internasional Arthur Anderson (AA). Banyak pengamat yang memberikan *statement* sebagaimana auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus dari Enron ini. Di Indonesia, tahun

2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Dari kita cerna dalam kasus-kasus tersebut, membuktikan bahwa masih adanya praktik manipulasi laporan keuangan yang tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan corporate governance. Bukti menunjukkan lemahnya praktik corporate governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al., 2004).

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance* Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memerhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris diwajibkan membentuk Komite. Terbentuknya Komite Audit menandakan mulai terbentuknya Good Corporate Governance yang baik. Keberadaan komite ini merupakan persyaratan bagi perusahaan yang listed di New York Stock Exchange (NYSE) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan oleh Bepepam di Indonesia melalui Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Menurut Purwati (2006) Pedoman Good Corporate Governance dipersiapkan dan disusun oleh Task Force Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan Good Corporate Governance yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite - komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite dalam membantu tugas Dewan Komisaris, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas:

- a. Pelaksanaan audit intern dan ekstern;
- b. Pengendalian intern dan laporan keuangan; dan
- c. Penerapan Good Corporate Governance.

Di samping ketiga tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite wajib untuk:

- a. Menyusun program kerja tahunan Komite. Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite beserta target kinerja. Program kerja ini wajib diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan disetujui sebelum tahun buku Bank disahkan.
- b. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.
- c. Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- d. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan kajian atas didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Dinyatakan dalam *New York Stock Exchange (NYSE) Corporate Accountability and Listing Standard Committee* tanggal 6 Juni 2002. Bahkan *Auditing Standard Board (1999)* mengeluarkan *Statement on Auditing Standards No.90: Audit Committee Communications*, yang mewajibkan auditor mendiskusikan kualitas prinsip akuntansi yang diterapkan di perusahaan. *The Blue Ribbon Committee (BRC) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee (1999)* menyatakan bahwa Komite Audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur.

Dalam konteks perusahaan, Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris,

Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Audit harus bekerja secara independen terhadap pihak manajemen dan bebas dari segala bentuk pengaruh yang negatif. Anggota dari Komite Audit harus tidak memiliki kekuasaan eksekutif, fungsi manajemen, atau pendelegasian tanggung jawab entitas keuangan. Komite Audit bersama Dewan Komisaris membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses manajemen risiko terintegrasi yang dikenal dengan nama enterprise risk management agar dapat melakukan pemantauan risiko secara efektif.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Beaver (1968) dalam Givoly dan Palmon (1982) memberikan bukti empiris berkaitan dengan isi informasi keuangan yang berupa pengumuman laba, dimana investor akan menunda pembelian atau penjualan sekuritasnya sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan auditan perusahaan. Manajer perusahaan akan sangat menghargai jika auditor mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opininya. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai audit report Lag.

Audit reporting lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Definisi ini digunakan oleh Casrlaw dan Kaplan (1991); Ansah (2000); Hossain dan Taylor (1998); Halim (2000); serta Ahmad dan Kamarudin (2001). Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau lag menjadi:

1. preliminary lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. auditor's signature lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
3. total lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut menyatakan 13 bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996 dan mulai berlaku kembali pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak berakhirnya tahun buku

Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sanksi dan denda yang

dikenakan cukup berat, namun demikian masih ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun sudah dibentuk Komite Audit.

Menurut Purwati (2006) Selama tahun 2002 Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 186 emiten dan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 4 emiten. Pada tahun 2003 sanksi administratif berupa denda diberikan kepada 83 emiten dan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 1 emiten. Untuk tahun 2004, sebanyak 27 emiten melakukan pelanggaran berupa tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Mengingat bahwa komite Audit didasarkan oleh “*best practices*” diharapkan dapat menjadi faktor penguat dalam sistem pelaporan keuangan, penelitian ini mencoba untuk menyajikan bukti empiris hubungan antara karakteristik komite audit dengan *Audit Lag*. Selain komite Audit, juga diselidiki apakah Proporsi Anggota Komite Audit yang Independen memiliki pengaruh terhadap *Audit Lag*. Menurut Kirk, (2000) dalam Naimi (2010) Komite Audit berperan dalam memberikan ulasan objektif mengenai informasi keuangan dan komite audit independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Komite Audit Independen diharapkan mampu mengurangi *Audit Lag* yang terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Naimi, *et al* (2010) adalah lingkungan penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia, kali ini penelitian dilakukan di Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu peneliti tidak menggunakan variable Independen “*CEO Duality*”. Alasannya adalah adanya perbedaan sistem

yang digunakan Malaysia dan Indonesia. Menurut Wardhani (2013) Malaysia menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut *board* dan pengurus perusahaan disebut *key executives*. OECD (2006) menyatakan dalam *one tier system* hanya terdapat satu dewan (*board*) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif.

Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain. Indonesia menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh *Board of Commisioner* dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh *Directors*. Pada sistem *two tier* dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, sebab Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul sebagai berikut : **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan, mengendalikan perusahaan, dasar pembuatan

keputusan, bahan pertimbangan dan pertanggung jawaban terhadap pihak eksternal. Dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Namun demikian, dalam SPAP terdapat standar yang mengatur mengenai prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh sebab itu seorang auditor membutuhkan waktu yang tidak singkat agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, relevan serta dapat diandalkan (Wardhani, 2013).

Diwajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Seperti dalam peraturan BAPEPAM No. X.K.2., lampiran keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Penelitian sebelumnya seperti, Henderson dan Kaplan (2000) yang fokus pada “lag” di sektor perbankan, Ahmad dan Kamarudin (2002) yang menyatakan bahwa “lag” audit yg lama terjadi di perusahaan yg mengalami kerugian, serta Wijaya (2012) yang membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Dan juga Wardhani (2013) yang menyatakan bahwa independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap

audit report lag. Dari hasil uraian tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap *audit report lag* perusahaan, karena dalam mencapai sebuah praktek *good corporate governance*, perusahaan harus mampu memenuhi prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian panjang - pendeknya *audit report lag* yang terjadi perlu diperhatikan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah Anggota Komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
2. Apakah Independensi Komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
3. Apakah jumlah pertemuan Komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
4. Apakah ukuran Dewan mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
5. Apakah Komisaris Independen mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* yaitu, Jumlah Anggota Komite Audit, Proporsi

Anggota komite Audit Independen, Jumlah Pertemuan Komite Audit, Jumlah ukuran Dewan, dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan peran *Corporate Governance* dalam mengurangi *audit report lag*.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat sebagai masukan sekaligus acuan dalam mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.
4. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai peran mekanisme *Corporate Governance* dan pengaruhnya dalam mengurangi *audit report lag*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai telaah pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi (*Agency Theory*) Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana ada satu atau lebih orang (yaitu principal atau pemegang saham atau pemilik) melibatkan atau menunjuk orang lain (yaitu agen atau manajemen) untuk bertindak atas nama pemilik. Tindakan tersebut meliputi pendelegasian beberapa wewenang dari pemilik untuk pengambilan keputusan. Para pemilik perusahaan berharap bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Manajemen diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang dipercayakan oleh pemilik semaksimal mungkin. Dengan demikian, para pemilik berharap manajemen dapat menyejahterakan mereka baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent disebut dengan *agency problems*, dan salah satu penyebab terjadinya *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah informasi yang tidak

seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent yang dapat berakibat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*.

Namun demikian berbagai konflik tetap ada dalam perusahaan. Konflik tersebut berupa konflik kepentingan, di antaranya ialah konflik antara manajer dengan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika kedua pihak yaitu *principal* dan *agent* berusaha untuk memaksimalkan *utilitas* masing-masing, maka ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. *Principal* dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan insentif yang sesuai untuk agen. Selain itu Prinsipal bersedia untuk mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring expenditure*) guna membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen. Semua itu disebut dengan biaya keagenan (*agency costs*).

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.

1). Asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

- (1). Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- (2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- (3). Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

- 2). Asumsi keorganisasian untuk menjelaskan tentang teori agensi yaitu
 - (1). Adanya konflik antar anggota organisasi,
 - (2). Efisiensi sebagai kriteria efektivitas
- 3). Adanya asimetri informasi antara principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang ada dapat dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent (Eisenhardt, 1989). Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik dan *agency cost*. Adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari: (Jensen dan Meckling, 1976)

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.

2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan BAPEPAM mengenai Corporate Governance, 2006).

Jadi, teori agensi ini yang mendasari praktek *corporate governance*. Dengan adanya praktek *corporate governance* ini diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit report lag*.

2.1.2 Corporate Governance

Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February 1999)

Menurut (Arifin, 2005) system *Corporate Governance (CG)* seperti didefinisikan oleh Cadbury Committee merupakan:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

(Seperangkat aturan yang Mengatur hubungan Antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan lainyabaik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak---hak dan kewajiban mereka)

Menurut Wardhani (2013) Untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah *audit report lag* yang berkepanjangan, suatu perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Corporate Governance (2006) terdiri dari:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu system informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang

menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.2.1 Komite Audit

The Bursa Malaysia Corporate Governance Guide (2009) menegaskan bahwa

:

The board is required by law to ensure that the financial statements of the company represent a true and fair view of the state of affairs of the company and that they are prepared in accordance with applicable approved accounting standards to assist in discharging the board's fiduciary duties, the responsibilities for overseeing the financial reporting process is often delegated to the audit committee.

(Dewan diperlukan oleh hukum untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan merwakili pandangan yang benar dan adil dari bagian urusan perusahaan dan laporan keuangan tersebut telah disediakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Untuk membantu dalam menjalankan tugas, tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sering didelegasikan kepada Komite Audit)

Menurut Wardhani (2013) Peraturan mengenai Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Bursa. Dalam bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ (sekarang bernama BEI) wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Di dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa Komisaris Independen sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Audit.

Menurut Wardhani (2013) Di Indonesia pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka

serangkaian mengenai ketentuan Komite Audit telah diterbitkan dalam, antara lain sebagai berikut:

- a) Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b) Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan public memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbarui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c) Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit (Wijaya, 2012).

2.1.2.1.1 Ukuran Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan BAPEPAM No. IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Di Indonesia, keanggotaan komite Audit beragam, disesuaikan dengan ukuran/ besar-

kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal (Wijaya, 2012).

Keberagaman jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *Audit Report Lag*. Menurut Naimi (2010) bahwa semakin besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan.

2.1.2.1.2 Independensi Komite Audit

Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kirk, 2000). Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasley dan Salterio, 2001).

Menurut Wardhani (2013) Di Indonesia, untuk menjamin Independensi Komite Audit, BAPEPAM (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa Audit, jasa non Audit dan atau

jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris Independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajin mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai :
 - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara rasional maupun secara vertical dengan komisaris
 - b) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.1.3 Rapat Komite Audit

Pertemuan Komite Audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan disitulah terjadi proses pemantauan pelaporan keuangan terjadi. Sebuah Komite Audit Independen tidak mungkin efektif kecuali jika keseluruhan anggota komitenya aktif (Menon dan William, 1994). *The National*

Committee on Fraudulent Financial reporting, atau biasa dikenal dengan *Treadway Comission* (1987), menyatakan bahwa Komite Audit yang ingin berperan penting dalam pengawasan perlu untuk mempertahankan tingkat aktivitas pertemuan yang tinggi. Salah satu cara untuk mengukur ketekunan Komite Audit adalah dengan mempertimbangkan jumlah pertemuan yang diadakan. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara periodik ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga samapai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Semakin seringnya rapat komite audit, akan semakin banyak pula masalah dan perdebatan yang akan dijumpai dalam proses audit. Dan terpotongnya waktu proses yang dilakukan saat proses audit. Maka dari itu, semakin banyaknya rapat komite audit diadakan akan memperlambat proses pelaporan dari audit.

2.1.3 Ukuran Dewan

Salah satu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak adalah masalah komunikasi atau koordinasi, yang membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor, dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit, (Dimitropoulos dan Asteriou, 2010) berpendapat bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu

kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan (Xie *et al*, 2003).

Didukung dengan prinsip *good corporate governance*, diharapkan dengan jumlah anggota dewan yang kecil suatu koordinasi dan penyampaian informasi dapat lebih efisien sehingga mampu memperpendek *Audit Report Lag*.

2.1.4 Komisaris Independen

Direktur non-eksekutif yang Independen dengan ketrampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian Independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi (Naimi, 2010). Dewan Independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham (Duchin, *et al* 2010). Fama dan Jensen (2003) berpendapat bahwa anggota dewan yang berasal dari luar memiliki insentif untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan tidak berkolusi dengan para manajer untuk menipu pemegang saham karena, "*there is substantial devaluation of human capital when internal controls break down*"(p.35). Bukti Empiris di Amerika Serikat, Inggris Yunani, Italia, Cina, Korea, dan Singapura, umumnya mendukung peran pengawasan positif dewan independen. Studi

menunjukkan bahwa masuknya direktur independen atau diluar dewan direksi meningkatkan kualitas pengungkapan (Naimi, 2010).

Di Indonesia, dalam struktur kepengurusan perusahaan selalu ada posisi Direksi dan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan pasal 108 ayat (1) mengatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasihat kepada direksi (Wardhani 2013).

Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) disebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang Terafiliasi. Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Disebutkan juga bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:

- i. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- ii. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan public dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir;
- iii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- iv. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- v. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, dan
- vi. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adanya keberadaan Komisaris Independen ini, karena tidak terafiliasi dengan pendiri atau pemegang saham mayoritas, diharapkan bisa mewakili kepentingan pemegang saham publik. Dengan begitu, kepentingan investor saham sebagai pemegang saham publik lebih terjamin

Dari uraian tersebut, peneliti ingin meneliti pengaruh proporsi dewan independen terhadap panjang-pendeknya *audit report lag* di Indonesia. Amirudin, 2004 menjelaskan, sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *corporate*

governance menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan korporasi. Dewan yang aktif, berwawasan luas, dan independen sangat diperlukan untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang terbaik (Barton dan Wong, 2006).

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Tujuan laporan keuangan adalah (M. Sadeli, 2002):

1. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
3. menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.

4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
5. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemiliknya.

2.1.6 Audit dan Standar Auditing

Sukrisno (2004) Menyatakan, Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*), adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor Independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*), adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai di pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*), merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, seorang auditor memiliki pedoman yang dinamakan standar auditing. Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Standar Umum, yaitu:

(Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan orang yang kompeten dan independen)

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya yang cermat.

- b) Standar Pekerjaan Lapangan, yaitu:

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.
3. Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c) Standar Pelaporan, yaitu:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

Adanya standar yang telah ditetapkan dan wajib dipenuhi membuat auditor harus lebih teliti dan berhati-hati sehingga auditor membutuhkan waktu yang cukup untuk memenuhi standar-standar tersebut. Namun demikian, salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Kondisi seperti ini menimbulkan dilemma bagi auditor, karena seorang auditor harus mampu menyajikan laporan keuangan auditan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam tergantung dari lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin cepat pekerjaan Audit selesai maka semakin cepat pula informasi di publikasikan (Wijaya, 2012).

Laporan keuangan perusahaan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam Laporan Keuangan terdapat ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk memenuhi tujuannya diperlukan keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan yang merupakan pertimbangan menentukan (IAI, 2001).

Dyer dan McHugh, 1974 menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan Pembuatan keputusan, tetapi informasi juga harus bersifat baru. Ketepatan waktu mengimplikasi bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Wijaya, 2012).

2.1.7 Audit Report Lag

Proses untuk menyediakan informasi akuntansi ke public memberikan nilai informasi dari laporan keuangan auditan yang akan ditentukan oleh *audit report lag*. Menurut Kechel dan Payne (2001) *audit report lag* adalah periode waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Dalam meningkatkan pngurangan *reporting lag* harus memperhatikan isi informasi dan relevansi informasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *timing of earnings announcement* berkaitan dengan *audit delay* (Givoly dan Palmon; 1982).

Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau *lag* menjadi tiga, yaitu:

1. *Preliminary lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.

2. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal tercantum dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Henderson dan Kaplan (2000) fokus pada “*lag*” pemeriksaan di sector perbankan dan hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengeluarkan laporan audit karena beroperasi dalam industri yang sangat teratur.

Ahmad dan Kamarudin (2002) peneliti dari Malaysia, menggunakan sampel 100 perusahaan public yang terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange* dengan tahun fiskal 1996-2000. Hasil penelitian menyatakan bahwa audit report lag yang lebih lama terjadi pada perusahaan: (1) Industri nonfinansial, (2) mendapat opini audit selain *unqualified opinion*, (3) memilik tahun fiskal yang berakhir selain 31 Desember, (4) diaudit oleh KAP *non Big Five*, (5) mengalami kerugian, (6) memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko diproksikan deng proporsi total utang dengan total aset. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan *audit report lag*.

Subekti (2005), menguji empiris *audit report lag* menggunakan *client cycle time* dan *firm cycle time*. Secara parsial hanya hanya *client size*, *loss* dan segmen

geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap *client cycle time* sedangkan ukuran kantor akuntan publik, *going concern opinion*, dan jenis perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *client cycle time*. Secara parsial hanya *client size*, *loss*, *going concern opinion*, dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap *firm cycle time* sedangkan ukuran kantor akuntan publik, dan jenis industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ukuran perusahaan.

Sejati (2007), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Audit delay pada perusahaan go publik di BEJ tahun 2003-2005, hasilnya klasifikasi industri, laba/rugi usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap, sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Setyorini (2008), menganalisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan publik di Indonesia, hasilnya ukuran perusahaan dan jenis Industri tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan ukuran KAP, jenis opini auditor, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Naimi (2010), meneliti tentang hubungan dari corporate governance dengan *audit report lag* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002, *Audit committee size* dan *Audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *Audit committee independence* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hashim dan Rahman (2011) meneliti tentang komite audit dengan *audit report lag* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2007-2009, penelitian ini menyatakan *Audit report lag* hanya dipengaruhi oleh variable

Audit committee independence dan *Audit committee expertise*, sedangkan variable *Audit committee meeting* tidak berpengaruh terhadap *Audit report lag*.

Wijaya (2012), meneliti pengaruh karakteristik komite Audit terhadap *audit report lag*, pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Penelitian ini menyatakan bahwa, Karakteristik komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* adalah jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota, sedangkan Independensi komite audit serta Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Wardhani (2013), menguji dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit, Independensi Komite Audit, Rapat komite audit, Kompetensi Anggota Komite Audit, Ukuran Dewan, dan Komisaris Independen terhadap *audit report lag* pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010-2011. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Selanjutnya ukuran komite, Rapat komite audit, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Henderson and Kaplan (2000)	<i>An Examination of Audit report Lag for Banks: A panel data approach</i>	a. ukuran perusahaan b. jenis industry c. laba/rugi d. pos-pos luar biasa e. opini audit f. auditor g. tahun tutup buku h. proporsi utang	Ukuran bank secara negative berhubungan dengan <i>audit report lag</i> dalam cross sectional analysis
2.	Ahmad dan Kamarudin	<i>Audit Report Lag and The</i>	a. ukuran	a. industri finansial, auditor dan tahun tutup buku

	(2002)	<i>Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence</i>	<p>perusahaan</p> <p>b. jenis industry</p> <p>c. laba/rugi</p> <p>d. pos-pos luar biasa</p> <p>e. opini audit</p> <p>f. auditor</p> <p>g. tahun tutup buku</p> <p>h. proporsi utang</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p>b. Kerugian, opini selain <i>unqualified opinion</i>, proporsi utang yang diproksikan dengan rasio total utang terhadap total asset berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>.</p> <p>c. Ukuran perusahaan dan pospos luar biasa yang dilaporkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
3.	Hamzah Ahmad, M. Nasrul Alim, dan Imam	<i>Pengujian Empiris Audit Report Lag</i>	<p>perusahaan</p> <p>b. ukuran KAP</p> <p>c. Laba/rugi</p>	<p><i>client size, loss</i> dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>client</i></p>

	Subekti (2005)	<p><i>menggunakn</i></p> <p><i>CLIENT</i></p> <p><i>CYCLE dan</i></p> <p><i>FIRM</i></p> <p><i>CYCLE</i></p> <p><i>TIME</i></p>	<p>yang</p> <p>dilaporkan</p> <p>klien</p> <p>d.<i>Going</i></p> <p><i>concern</i></p> <p><i>opinion</i></p> <p>e.Jumlah</p> <p>segmen</p> <p>geografis</p> <p>perusahaan</p> <p>f. Jenis</p> <p>Industri</p>	<p><i>cycle time</i> sedangkan ukuran</p> <p>kantor akuntan publik, <i>going</i></p> <p><i>concern opinion</i>, dan jenis</p> <p>perusahaan tidak</p> <p>berpengaruh</p> <p>secara signifikan terhadap</p> <p><i>client</i></p> <p><i>cycle time. client size, loss,</i></p> <p><i>going</i></p> <p><i>concern opinion</i>, dan</p> <p>segmen</p> <p>geografis yang berpengaruh</p> <p>secara signifikan terhadap</p> <p><i>firm</i></p> <p><i>cycle time</i> sedangkan ukuran</p> <p>kantor akuntan publik, dan</p> <p>jenis</p>
--	----------------	---	---	---

				industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ukuran perusahaan.
4.	Anggit Wasis Sejati (2007)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2003-2005</i>	a.ukuran perusahaan b.Klasifikasi Industri c.Laba/Rugi Perusahaan	klasifikasi industri, laba/rugi usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap, sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

5.	Indah Setyorini (2008)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lamanya Penyelesaian Audit (Audit Delay) Pada Perusahaan Publik Di Indonesia</i>	a.ukuran perusahaan b.ukuran KAP c.Jenis Opini Auditor d.Laba/Rugi usaha e.Jenis Industri	ukuran perusahaan dan jenis Industri tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan ukuran KAP, jenis opini auditor, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
6.	M. Naimi, Shafie dan Hussin (2010)	<i>Corporate Governance and Audit report lag in</i>	a.Audit committee size b.Audit committee	a. Audit committee size berpengaruh negatif terhadap audit report lag b. Audit committee independence tidak

		<i>Malaysia</i>	independen c.Audit committee meeting d.Audit committee financial expertise e.Board size f.Board independen g.CEO duality	berpengaruh terhadap audit report lag c. Audit committee meeting berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
7.	Hashim dan Rahman (2011)	<i>Audit report lag and the Effectiveness of Audit</i>	a. Audit committee independenb. Audit	Audit report lag hanya dipengaruhi oleh variabel Audit committee independence dan

		<i>Committee Among Malaysian Listed Companies</i>	committee meeting c. Audit committee expertise d. Company size e. Type of audit firm f. Profitability	Audit committee expertise, sedangkan variabel Audit committee meeting tidak berpengaruh terhadap audit report lag.
8.	Aditya Taruna Wijaya (2012)	<i>Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Audit Report</i>	a. Independensi komite audit b. Rapat komite Audit	Karakteristik komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> adalah jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota,

		<i>Lag</i>	c.Kompetensi anggota Komite Audit d.Jumlah anggota komite Audit	sedangkan Independensi komite audit serta Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.
9.	Armania Putri Wardhani (2013)	<i>Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag</i>	a.Ukuran Komite Audit b.Independensi Komite Audit c.Rapat Komite Audit d.Kompetensi Anggota Komite Audit e.Ukuran Dewan	Independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Selanjutnya ukuran komite, Rapat komite audit, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .

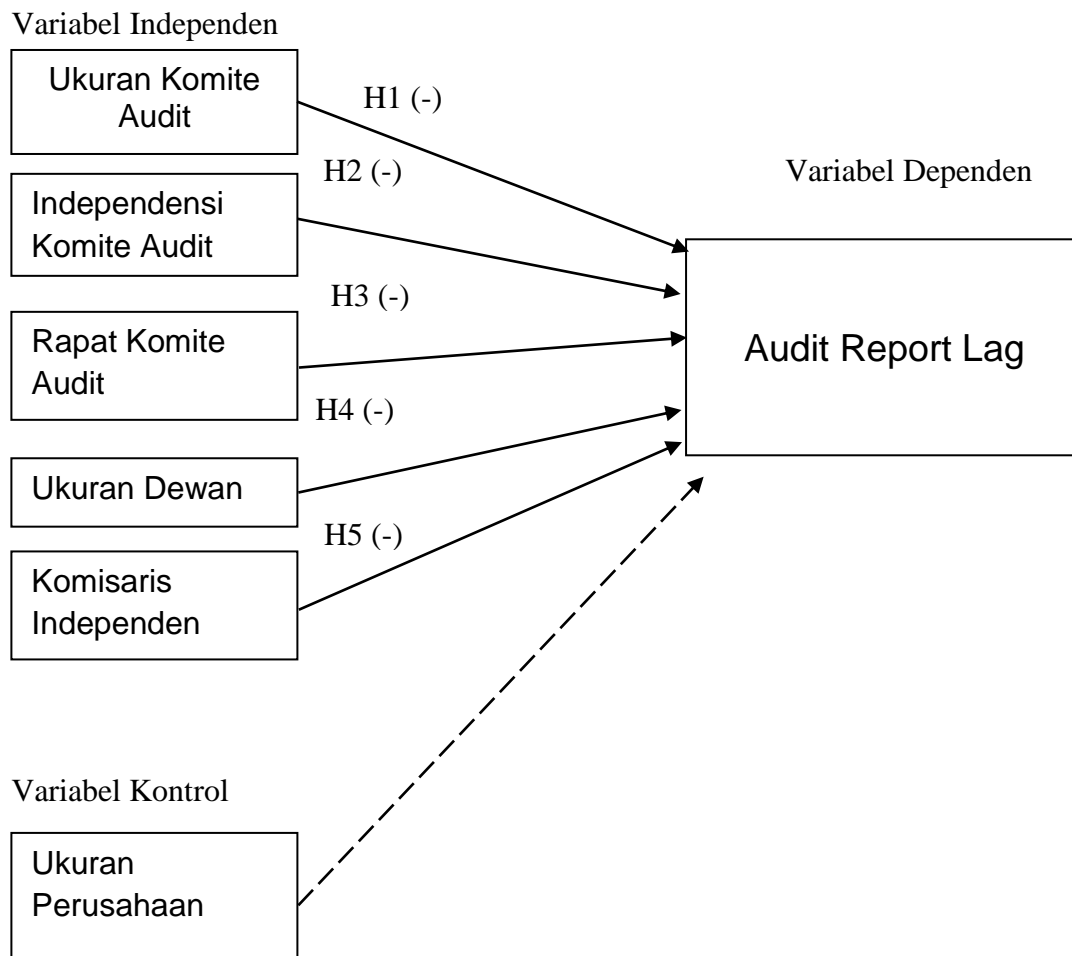
			f.Komisaris Independen g.KAP h.Anak Perusahaan i.Ukuran Perusahaan	
--	--	--	--	--

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi audit report lag. Faktor faktor tersebut antara lain Ukuran Komite Audit, Independensi komite Audit, Rapat komite Audit, Ukuran dewan, Independensi Dewan, dan Ukuran Perusahaan. kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report lag*

Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Di Indonesia, keanggotaan Komite Audit beragam, disesuaikan dengan ukuran/ besar-kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal.

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Dengan demikian dibentuklah Komite Audit, dengan harapan semakin banyak Komite Audit, akan semakin mengurangi *audit report lag* karena akan semakin banyak divisi yang akan melakukan tugasnya. Dimana semakin banyak orang akan semakin banyak tenaga yang melakukan tugasnya.

Keberagaman jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam. Logikanya bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *Audit Report Lag*. Semakin besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas

pengawasan. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan penelitian terdahulu yang mengatakan Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Dengan demikian, semakin banyak proporsi Komite Audit yang independen akan semakin berkurangnya orang yang tidak memiliki kepentingan apapun didalam perusahaan dan mengurangi adanya intervensi terhadap pengerjaan laporan.

Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan logikanya Komite Audit Independen dapat

berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Semakin banyak Komite Audit yang independen, maka akan semakin sedikit orang yang berkepentingan didalam perusahaan. Dengan demikian, akan semakin sedikit intervensi dan akan berfokus terhadap pengerjaan laporan yang dimana waktu tidak akan terbuang dalam pengerjaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit, dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan penelitian terdahulu yang mengatakan Independensi berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit report lag*.

2.4.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Audit report lag

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan

waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Dengan demikian, semakin banyaknya rapat komite audit, akan semakin cepat teratasinya masalah yang ada dalam proses pembentukan laporan.

Logikanya, adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu. Jika komite Audit menemui masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit rendah maka, masalah tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, diharapkan adanya frekuensi pertemuan komite Audit yang tinggi dapat memperpendek *Audit Report Lag*. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan penelitian terdahulu yang mengatakan Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Rapat Komite Audit Berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Audit report lag

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Dengan demikian, semakin banyak dewan akan semakin banyak jumlah anggota yang akan lebih fokus terhadap masing-masing departemen.

Logikanya, ukuran dewan direksi dan komisaris yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dinilai akan lebih fokus pada masing-masing departemen sehingga penyelesaian aktivitas masing-masing departemen dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Didukung dengan prinsip *good corporate governance*, dengan keberadaan anggota dewan dengan kemampuan yang baik diharapkan dengan jumlah anggota dewan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan penelitian terdahulu yang mengatakan Dewan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ke empat yaitu:

H4: Ukuran Dewan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Audit report lag

Direktur non-eksekutif yang Independen dengan keterampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian Independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi. Logikanya, Dewan Independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Anggota dewan yang berasal dari luar memiliki insentif untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan tidak berkolusi dengan para manajer untuk menipu pemegang saham karena, "*there is substantial devaluation of human capital when internal controls break down*"(p.35). Bukti Empiris di Amerika Serikat, Inggris Yunani,

Italia, Cina, Korea, dan Singapura, umumnya mendukung peran pengawasan positif dewan independen. Studi menunjukkan bahwa masuknya direktur independen atau diluar dewan direksi meningkatkan kualitas pengungkapan.

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Dengan demikian, semakin banyak proporsi komisaris yang independen akan semakin berkurangnya orang yang tidak memiliki kepentingan apapun didalam perusahaan dan mengurangi adanya intervensi terhadap pengerjaan laporan.

Dari uraian tersebut, peneliti ingin meneliti pengaruh proporsi dewan independen terhadap panjang-pendeknya *audit report lag* di Indonesia. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *corporate governance* menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan korporasi. Dewan yang aktif, berwawasan luas, dan independen sangat diperlukan untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang terbaik. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan penelitian terdahulu yang mengatakan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis terakhir dari penelitian ini yaitu:

H5: Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit report lag suatu perusahaan. Variabel audit report lag dilambangkan dalam variabel ARL.

Pengertian audit report lag itu sendiri adalah jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Selain yang tersebut di atas, audit report lag dapat juga diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Variabel audit report lag diukur secara kuantitatif jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi komite audit, ukuran dewan, independensi dewan.

3.1.2.1 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan surat edaran dari direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta pedoman pembentukan komite audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ukuran Komite Audit ini dilambangkan dalam ACSIZE.

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kirk, 2000). Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasle dan Salterio, 2001). Variabel ini diukur dari proporsi

Independensi jumlah komite audit. Variabel Independensi Komite Audit dilambangkan dalam ACINDP.

3.1.2.3 Rapat Komite Audit

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun untuk mendiskusikan pelaporan keuangan dengan auditor eksternal (Wijaya, 2012). Variabel ini diukur menggunakan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan ACMEET.

3.1.2.4 Ukuran Dewan

Ukuran dewan direksi yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dinilai akan lebih fokus pada masing-masing departemen sehingga penyelesaian aktivitas masing-masing departemen dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Didukung dengan prinsip *good corporate governance*, dengan keberadaan anggota dewan dengan kemampuan yang baik diharapkan dengan jumlah anggota dewan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik. Cara mengukur variabel ini dengan menghitung jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan BOARDSIZE.

3.1.2.5 Komisaris Independen

Independensi dewan diharapkan dapat diperoleh dengan hadirnya komisaris independen. Menurut Matsusaka dan Ozbas (2010), adanya komisaris independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Cara mengukur variabel ini adalah dengan melihat proporsi jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel COMINDEP.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Penelitian ini menggunakan satu variabel control untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi panjang-pendeknya audit report lag. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Ukuran perusahaan.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ashton et al (1989), dalam Naimi et al (2010) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat memilih untuk menerapkan kontrol internal yang kuat, yang memungkinkan auditor untuk menempatkan ketergantungan lebih pada tes kepatuhan interim dari pada pengujian substantif saldo akhir tahun, sehingga

memfasilitasi penyelesaian audit yang tepat waktu. Variabel ini diukur dengan natural log total asset perusahaan pada saat tutup tahun. Variabel ini dilambangkan SIZE.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan rangkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan (financial statement) pada tahun 2010-2013
2. Bukan merupakan perusahaan keuangan
3. Memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

laporan tahunan (annual report) perusahaan-perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi

jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah ujnormalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi normalitas data, dilakukan melalui analisis statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 = Data residual terdistribusi normal.

H_1 = Data residual tidak terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut :

- a) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Nilai cut-off yang umum adalah:

1. Jika nilai Tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai Tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

3.5.3 Analisis Regresi

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$ARL = \beta_0 + \beta_1 ACSIZE + \beta_2 ACINDP + \beta_3 ACMEET + \beta_4 BOARDSIZE + \beta_5 COMINDEP + \beta_6 SIZE + \varepsilon$$

dimana:

β_0 = Konstanta

ARL = audit report lag, diartikan jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku dan tanggal laporan audit, dihitung secara kuantitatif per hari

ACSIZE = jumlah anggota komite audit

ACINDP = proporsi anggota komite audit non-komisaris independen dengan seluruh anggota komite audit

ACMEET = jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit

BOARDSIZE = Jumlah anggota dewan

COMINDEP = proporsi komisaris independen dengan jumlah anggota dewan

SIZE = natural log total asset perusahaan pada saat tutup tahun

3.5.3.1 Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien dterminasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Penelitian ini menggunakan nilai *adj R²* karena mampu mengatasi bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Nilai *Adj R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima. Jika nilai probabilitas signifikansi $> \alpha$, maka hipotesis ditolak.